

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui observasi dan wawancara, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada kantor Sekretariat Daerah Pesisir Selatan telah sesuai dengan siklus yang tertera dalam buku pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu Permendagri No. 19 tahun 2016. Siklus ini meliputi: pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta ganti rugi
2. Dalam Evaluasi tingkat kesesuaian penataan aset tetap di bagian keuangan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh tingkat kesesuaiannya sebesar 87,1% yaitu termasuk kategori sangat sesuai, sehingga dalam implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah Kantor Sekretariat Daerah Pesisir Selatan masih belum berjalan secara optimal dikarenakan masih masih ada item kriteria yang tidak lengkap seperti item aset tetap, keterangan nomor kode, nomor registrasi barang, keterangan konstruksi dan ukuran tidak lengkap.
3. Dalam Ringkasan Pengeluaran Aset daerah pada setda kabupaten pesisir selatan, Dibagian Aset Tanah tahun 2021 senilai Rp. 17.193.144.031

merupakan aset yang dikuasai pemerintah Kabupaten pesisir Selatan dan tercatat pada SKPD Sekretariat Daerah. Pada tahun 2022 adanya pengurangan aset tanah sebesar Rp. 77.376.260 yang telah dihibahkan kepada KUA Kecamatan Bayang seluas 468 M2 yang terletak di Kampung Tanjung Durian Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang, sehingga berkurangnya jumlah tanah yang tercatat pada SKPD Sekretariat Daerah menjadi Rp. Rp. 17.115.767.772. Sehingga dengan demikian total aset tanah pada Sekretariat Daerah tahun 2022 menjadi Rp. 17.115.767.772 dan Aset Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar Rp. 24.207.019.628 untuk tahun 2022 terjadi penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp. 361.063.641 sehingga total jumlah aset peralatan dan mesin tahun 2022 Rp. 24.579.089.651

4. Dalam Hambatan terjadi pada Bendahara Pengeluaran dan PPTK tidak tepat waktu dalam menyajikan Laporan Realisasi Belanja dan SP) pada Bagian Keuangan sehingga terkendala dalam penyelesaian Laporan Fungsional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SKPD dan berakibat terlambatnya penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca kepada BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan. Kedepan diusahakan hambatan ini tidak akan terjadi lagi dan laporan keuangan dapat disampaikan tepat pada waktunya.

5.2 Saran

1. Penulis berharap ada penegasan pengurus barang dalam mengelola Barang Milik Daerah yang ada sehingga tidak ada lagi keterlambatan dalam pelaporan Barang Milik Daerah.
2. Dibutuhkan koordinasi dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam

pengurus barang milik daerah agar pengurus barang milik daerah dapat dilaksanakan lebih optimal. Sehingga semua pihak yang terlibat dalam pengurus barang milik daerah akan memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

